

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina A ,Oasi (2013) *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah Malang Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya*.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya Yang Dilakukan Daerah.([www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2511/diakses tanggal 6 Mei 2012](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2511/diakses%20tanggal%206%20Mei%202012)).
- Davey, K. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Negara Dunia Ketiga*. UI Jakarta : Jakarta.
- Farian, Endi. 2010. Skripsi. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Serunjai*. Jurnal Eko.Pemb. vol.XXXVI/2010/9/18.
- Halim, Abdul 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah edisi Ketiga*. UPP AMP YKPN
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hyman P. Minsky, 1994. "*Financial Instability and the Decline(?) of Banking: Public Policy Implications*," *Economics Working Paper Archive wp\_127*, Levy Economics Institute.
- Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koesoemahatmadja, Mochtar, 1979, *Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Ladjin, Nurjanna. 2008. Tesis. *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (studi kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)* (Oline) ([http://eprints.undip.ac.id/18492/1/NURJAN A LADJIN .pdf](http://eprints.undip.ac.id/18492/1/NURJAN_A_LADJIN.pdf) di akses tanggal 16 April 2012).
- Mahardika, I Gusti Ngurah Suryadi dan Artin (2012) *Jurnal Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*.
- Mahmudi. 2010. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: ITS Press.
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* Vol. XXXVII (September 1999) pp. 1120–1149.
- Paturusi, Idrus A, dkk. 2009. Hasil Penelitian. *Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. UNHAS. Digilib. UNHAS.
- Peraturan Pemerintah RI. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002. *Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sukriy dan Halim Abdullah. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI: 1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003
- Surandajang. 2005. Babak baru system pemerintahan daerah. Kasta hasta Jakarta
- Suryaningrat, Bayu., (1980). *Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya*. Jakarta: Metro Pos.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Malang: Bumi Aksara.
- Undang-Undang RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.

- Wulandari, Anita. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November. (<http://www.scribd.com/doc/101754251>)
- Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.

Universitas Tanjungpura